

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue background with a subtle grid pattern. To the left of the logo is a vertical red bar, and below it are several horizontal white lines.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN NOMOR 13

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN NOMOR 13

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.05/2015

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai penyajian, pedoman struktur, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 1005/S/I-XII/09/2014 tanggal 3 September 2014 telah memberikan pertimbangan atas Rancangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

Pasal 2

Badan Layanan Umum selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

Pasal 3

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh Badan Layanan Umum selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan mulai Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 4

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh Badan Layanan Umum selaku entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan SAP berbasis akrual.

Pasal 5

- (1) SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam bentuk PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 6

PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum selaku entitas pelaporan mulai Tahun 2016.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1818

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



WARDJIANTO
NIP 196803241989121001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217/PMK.05/2015
TENTANG
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 13 TENTANG
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

1

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1-7
TUJUAN	3
RUANG LINGKUP	4-5
ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN	6-7
DEFINISI	8-9
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM	10
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM	11
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM	12-13
STRUKTUR DAN ISI	14-16
PENDAHULUAN	14
PERIODE PELAPORAN	15
TEPAT WAKTU	16
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	17-51
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	52-55
NERACA	56-71
LAPORAN OPERASIONAL	72-89
LAPORAN ARUS KAS	90- 111
AKTIVITAS OPERASI	92-93
AKTIVITAS INVESTASI	94-99
AKTIVITAS PENDANAAN	100-106
AKTIVITAS TRANSITORIS	107-111
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	112-115
PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN	116 –123
PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA	124-125
TANGGAL EFEKTIF	126

2

1			
2	Lampiran:		
3			
4	Ilustrasi Lampiran PSAP 13.A	:	Contoh Format Laporan
5			Realisasi Anggaran Badan
6			Layanan Umum
7	Ilustrasi Lampiran PSAP 13.B	:	Contoh Format Laporan
8			Perubahan Saldo Anggaran
9			Lebih Badan Layanan Umum
10	Ilustrasi Lampiran PSAP 13.C	:	Contoh Format Neraca Badan
11			Layanan Umum
12	Ilustrasi Lampiran PSAP 13.D	:	Contoh Format Laporan
13			Operasional Badan Layanan
14			Umum
15	Ilustrasi Lampiran PSAP 13.E	:	Contoh Format Laporan Arus
16			Kas Badan Layanan Umum
17	Ilustrasi Lampiran PSAP 13.F	:	Contoh Format Laporan
18			Perubahan Ekuitas Badan
19			Layanan Umum.
20			

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **NOMOR 13**
4 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**
5 **BADAN LAYANAN UMUM**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks*
8 *paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa*
9 *dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

10 **PENDAHULUAN**

11 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
12 Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan
13 kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan
14 kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
15 Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan
16 keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat
17 untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan,
18 melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.
19 Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik,
20 seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus,
21 dan pengelolaan kawasan.

22 2. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan
23 pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan
24 keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja,
25 pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi
26 dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan
27 tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan
28 pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

TUJUAN

3. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

RUANG LINGKUP

4. *Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini.*

5. *BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.*

ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

6. *BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:*

- a. *pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;*
- b. *entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. *pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;*

- 1 **d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik**
2 **langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang**
3 **membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil**
4 **rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;**
- 5 **e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan,**
6 **antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas,**
7 **investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;**
- 8 **f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak**
9 **ketiga;**
- 10 **g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas**
11 **akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;**
- 12 **h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian**
13 **program pemerintah; dan**
- 14 **i. laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor**
15 **eksternal.**
- 16 **7. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah**
17 **(APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah**
18 **entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan**
19 **pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara**
20 **organisatoris membawahnya.**

21 **DEFINISI**

- 22 **8. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU**
23 **adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah**
24 **daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada**
25 **masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang**
26 **dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam**
27 **melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan**
28 **produktivitas.**
- 29 **9. Laporan Keuangan BLU adalah bentuk**
30 **pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan**
31 **Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,**

1 ***Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan***
2 ***Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.***

3 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

4 10. Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur
5 mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan
6 oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan
7 informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo
8 anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU
9 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
10 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara
11 spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan
12 informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
13 menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
14 dipercayakan kepadanya, dengan:

- 15 a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
16 kewajiban, dan ekuitas BLU;
- 17 b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
18 ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
- 19 c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
20 penggunaan sumber daya ekonomi;
- 21 d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
22 anggarannya;
- 23 e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
24 mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 25 f. menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai
26 penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
- 27 g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
28 kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

29 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN** 30 **LAYANAN UMUM**

1 11. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan
2 keuangan BLU berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang
3 ditunjuk.

4 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN** 5 **UMUM**

6 12. **Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:**

7 **a. Laporan Realisasi Anggaran;**

8 **b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;**

9 **c. Neraca;**

10 **d. Laporan Operasional;**

11 **e. Laporan Arus Kas;**

12 **f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan**

13 **g. Catatan atas Laporan Keuangan.**

14 13. Laporan keuangan BLU memberikan informasi tentang
15 sumber daya ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan
16 arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini
17 diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap
18 kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di
19 masa mendatang.

20 **STRUKTUR DAN ISI**

21 **PENDAHULUAN**

22 14. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya
23 pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan
24 keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam
25 lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan
26 Keuangan.

27 **PERIODE PELAPORAN**

28 15. Laporan keuangan BLU disajikan paling kurang sekali dalam
29 setahun.

TEPAT WAKTU

16. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

17. *Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.*

18. *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:*

- a. *Pendapatan-LRA;*
- b. *Belanja;*
- c. *Surplus/defisit-LRA;*
- d. *Penerimaan pembiayaan;*
- e. *Pengeluaran pembiayaan;*
- f. *Pembiayaan neto; dan*
- g. *Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).*

19. *Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.*

20. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa

1 pendapatan BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas
2 Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang
3 mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan
4 persetujuan atau pengesahan.

5 **21. Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat**
6 **pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan**
7 **oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.**

8 22. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan
9 pendapatan-LRA BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
10 lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat
11 mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLU yang disampaikan
12 kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah
13 (BUD).

14 23. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLU
15 merupakan bagian dari BUN/BUD, maka pendapatan-LRA BLU diakui
16 pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLU.

17 **24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan**
18 **asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan**
19 **tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan**
20 **dengan pengeluaran).**

21 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-**
22 **LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan**
23 **dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu**
24 **dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat**
25 **dikecualikan.**

26 **26. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi**
27 **(KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu**
28 **mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra**
29 **KSO.**

30 **27. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU**
31 **tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU**
32 **penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.**

1 28. **Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU**
2 **tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo**
3 **Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah**
4 **pusat/pemerintah daerah.**

5 29. **Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut**
6 **jenis pendapatan.**

7 30. **Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan**
8 **bukan pajak.**

9 31. **Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah:**

10 **a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;**

11 **b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas**
12 **akuntansi/entitas pelaporan;**

13 **c. Pendapatan hasil kerja sama;**

14 **d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan**

15 **e. Pendapatan BLU lainnya.**

16 32. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat
17 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf a adalah imbalan
18 yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

19 33. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas
20 akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf
21 31 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang
22 diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
23 membawahi maupun yang tidak membawahnya.

24 34. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
25 Paragraf 31 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional,
26 sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi
27 BLU.

28 35. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas
29 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf d adalah pendapatan
30 yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa
31 adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa.

1 36. Pendapatan BLU lainnya sebagaimana dimaksud dalam
2 Paragraf 31 huruf e, antara lain berupa:

- 3 a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- 4 b. jasa giro;
- 5 c. pendapatan bunga;
- 6 d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
7 asing; dan/atau
- 8 e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
9 penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
10 BLU.

11 37. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan
12 pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan
13 Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang
14 berbasis akrual.

15 38. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas
16 akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf
17 31 huruf b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus
18 BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan
19 Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian
20 negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

21 39. ***Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas***
22 ***yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai***
23 ***fungsi perbendaharaan umum.***

24 40. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi
25 ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

26 41. Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai,
27 belanja barang, dan belanja modal.

28 42. ***Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU***
29 ***selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos***
30 ***Surplus/Defisit-LRA.***

31 43. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang
32 melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka

1 panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat
2 pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka
3 panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada
4 BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau
5 pengeluaran investasi jangka panjang.

6 44. ***Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat***
7 ***kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai***
8 ***fungsi perbendaharaan umum.***

9 45. ***Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat***
10 ***pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai***
11 ***fungsi perbendaharaan umum.***

12 46. ***Penambahan pokok investasi yang berasal dari***
13 ***pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.***

14 47. ***Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan***
15 ***pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat***
16 ***dalam Pembiayaan Neto.***

17 48. ***Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA***
18 ***dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan***
19 ***selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.***

20 49. ***Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari***
21 ***entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka***
22 ***BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas***
23 ***pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.***

24 50. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLU sebagaimana
25 dimaksud dalam Paragraf 49 adalah alokasi anggaran yang tidak
26 terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLU kepada
27 entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya
28 alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD
29 kepada BLU yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah
30 daerah/SKPD.

31 51. Contoh format LRA BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini.
32 Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari

1 standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan
2 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

3 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

4 52. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan*
5 *informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih*
6 *tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.*

7 53. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU*
8 *menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-*
9 *pos berikut:*

- 10 a. *Saldo Anggaran Lebih awal;*
- 11 b. *Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;*
- 12 c. *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;*
- 13 d. *Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;*
- 14 e. *Lain-lain; dan*
- 15 f. *Saldo Anggaran Lebih Akhir.*

16 54. *Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut*
17 *dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan*
18 *Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

19 55. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
20 BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan
21 contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi
22 ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu
23 dalam pelaporan keuangan.

24 **NERACA**

25 56. *Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas*
26 *pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal*
27 *tertentu.*

28 57. Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode
29 sebelumnya pos-pos berikut:

- 30 a. *Kas dan setara kas;*

- 1 **b. Investasi jangka pendek;**
- 2 **c. piutang dari kegiatan BLU;**
- 3 **d. persediaan;**
- 4 **e. Investasi jangka panjang;**
- 5 **f. aset tetap;**
- 6 **g. aset lainnya;**
- 7 **h. kewajiban jangka pendek;**
- 8 **i. kewajiban jangka panjang; dan**
- 9 **j. ekuitas.**

10 58. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang
11 berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui
12 oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

13 59. **Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan**
14 **kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum**
15 **merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.**

16 60. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL
17 pada BLU, BLU harus dapat mengidentifikasi kas pada BLU yang
18 berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai
19 fungsi perbendaharaan umum.

20 61. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas
21 yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal
22 dari APBN/APBD.

23 62. **Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai**
24 **kas dan setara kas.**

25 63. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 antara
26 lain:

- 27 a. Dana titipan pihak ketiga;
- 28 b. Uang jaminan; dan
- 29 c. Uang muka pasien rumah sakit.

30 64. **Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD**
31 **diakui sebagai aset lainnya.**

1 65. **Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU**
2 **pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan**
3 **sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada**
4 **Pemerintah Pusat/Daerah.**

5 66. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLU
6 tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas
7 persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota.
8 Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen
9 dan investasi nonpermanen.

10 67. Investasi permanen pada BLU, antara lain berbentuk
11 penyertaan modal.

12 68. Investasi nonpermanen pada BLU, antara lain sebagai
13 berikut:

- 14 a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
- 15 b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
- 16 c. Investasi nonpermanen lainnya.

17 69. **Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada**
18 **BUN/BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada**
19 **laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini**
20 **selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana**
21 **seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam**
22 **melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani**
23 **masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU.**

24 70. BUN/BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga
25 investasi yang dicatat oleh BLU pada laporan keuangan BUN/BUD.

26 71. Contoh format Neraca BLU disajikan dalam ilustrasi PSAP
27 ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian
28 dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan
29 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

30
31

LAPORAN OPERASIONAL

72. *Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.*

73. *Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut:*

- a. Pendapatan-LO;*
- b. Beban;*
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;*
- d. Kegiatan nonoperasional;*
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;*
- f. Pos Luar Biasa; dan*
- g. Surplus/Defisit-LO.*

74. *BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:*

- a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;*
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;*
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;*
- d. Pendapatan hasil kerja sama;*
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan*
- f. Pendapatan BLU lainnya.*

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

75. BLU menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

76. *Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:*

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;*

1 **b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber**
2 **daya ekonomi.**

3 77. Pendapatan-LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan
4 atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan
5 peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak
6 untuk menagih imbalan.

7 78. Pendapatan-LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi
8 adalah hak yang telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu
9 adanya penagihan.

10 79. **Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan**
11 **bukan pajak.**

12 80. **Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan**
13 **asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan**
14 **tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan**
15 **dengan pengeluaran).**

16 81. **Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO**
17 **bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud**
18 **dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan**
19 **proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.**

20 82. **Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi**
21 **(KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu**
22 **mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra**
23 **KSO.**

24 83. **Beban pada BLU diakui pada saat:**

25 **a. timbulnya kewajiban;**

26 **b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau**

27 **c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

28 84. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan
29 hak dari pihak lain ke BLU tanpa diikuti keluarnya kas.

30 85. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah
31 saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului

1 timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan
2 operasional BLU.

3 86. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
4 terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
5 penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan
6 manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau
7 amortisasi.

8 87. ***Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi***
9 ***ekonomi.***

10 88. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai, beban
11 barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset
12 tetap/amortisasi.

13 89. Contoh format Laporan Operasional BLU disajikan dalam
14 ilustrasi standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan
15 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah
16 menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam
17 klarifikasi artinya.

18 **LAPORAN ARUS KAS**

19 90. ***Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi***
20 ***mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas***
21 ***selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas***
22 ***pada tanggal pelaporan pada BLU.***

23 91. ***Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan***
24 ***berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan***
25 ***transitoris.***

26 **AKTIVITAS OPERASI**

27 92. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh
28 dari:

- 29 a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
30 b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

- 1 c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas
- 2 akuntansi/entitas pelaporan;
- 3 d. Pendapatan hasil kerja sama;
- 4 e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 5 f. Pendapatan BLU lainnya.

6 93. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan
7 untuk:

- 8 a. Pembayaran Pegawai;
- 9 b. Pembayaran Barang;
- 10 c. Pembayaran Bunga; dan
- 11 d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

12 **AKTIVITAS INVESTASI**

13 94. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan
14 pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset
15 tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek
16 dan setara kas.

17 95. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan
18 dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan
19 sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan
20 mendukung pelayanan BLU kepada masyarakat di masa yang akan
21 datang.

22 96. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri
23 atas:

- 24 a. Penjualan Aset Tetap;
- 25 b. Penjualan Aset Lainnya;
- 26 c. Penerimaan dari Divestasi; dan
- 27 d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

28 97. Investasi yang dilakukan oleh BLU dapat berasal dari
29 pendapatan BLU dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi
30 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf c dan Penjualan
31 Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam

1 Paragraf 96 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan
2 penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan investasi
3 yang berasal dari APBN/APBD.

4 98. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri
5 atas:

- 6 a. Perolehan Aset Tetap;
- 7 b. Perolehan Aset Lainnya;
- 8 c. Penyertaan Modal;
- 9 d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- 10 e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

11 99. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud
12 dalam Paragraf 98 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk
13 sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 huruf d, dan
14 perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud
15 dalam Paragraf 98 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan
16 pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan
17 pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

18 **AKTIVITAS PENDANAAN**

19 100. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan
20 pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman
21 jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang
22 mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman
23 jangka panjang dan utang jangka panjang.

24 101. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan
25 penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan
26 perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

27 102. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain
28 sebagai berikut:

- 29 a. Penerimaan pinjaman; dan
- 30 b. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

1 103. Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah
2 daerah, BLU dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan
3 investasi BLU. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk
4 diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 102 huruf b
5 merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai
6 dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka
7 panjang kepada BUN/BUD pada neraca.

8 104. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang,
9 BLU harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas
10 aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLU menyetor kembali dana
11 investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut
12 diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

13 105. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain
14 sebagai berikut:

- 15 a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
- 16 b. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

17 106. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD
18 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan
19 pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena
20 penarikan dana investasi dari masyarakat.

21 **AKTIVITAS TRANSITORIS**

22 107. ***Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan***
23 ***pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,***
24 ***investasi, dan pendanaan.***

25 108. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan
26 penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi
27 pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari
28 aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga
29 (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang
30 diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

1 109. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi
2 penerimaan PFK.

3 110. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi
4 pengeluaran PFK.

5 111. Contoh format Laporan Arus Kas BLU disajikan dalam
6 ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan
7 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah
8 menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam
9 pelaporan keuangan.

10 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

11 112. ***Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi***
12 ***kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan***
13 ***dibandingkan dengan tahun sebelumnya.***

14 113. ***Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan***
15 ***paling kurang pos-pos sebagai berikut:***

16 ***a. Ekuitas awal;***

17 ***b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;***

18 ***c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi***
19 ***ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif***
20 ***yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan***
21 ***koreksi kesalahan mendasar, misalnya:***

22 ***1). koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang***
23 ***terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan***

24 ***2). perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.***

25 ***d. Ekuitas akhir.***

26 114. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari
27 unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam
28 Catatan atas Laporan Keuangan.

29 115. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU
30 disajikan pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh
31 dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini

1 adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam
2 pelaporan keuangan.

3 **PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN**
4 **LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN**
5 **ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

6 116. *Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan*
7 *Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan*
8 *pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan*
9 *yang membawahnya.*

10 117. *Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada*
11 *LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas*
12 *akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.*

13 118. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas
14 pelaporan yang tidak berstatus BLU, unsur LRA entitas tersebut
15 terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur
16 surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan
17 membawahi satuan kerja BLU, LRA konsolidasian entitas
18 akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLU.

19 119. *Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan*
20 *Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*

21 120. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLU yang
22 dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi
23 perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan
24 yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
25 perbendaharaan umum.

26 121. Laporan Perubahan SAL BLU tidak digabungkan pada
27 laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena
28 entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL
29 termasuk pemerintah daerah.

1 122. **Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam**
2 **Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan**
3 **entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan**
4 **konsolidasiannya.**

5 123. **Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke**
6 **dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu**
7 **dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik**
8 **(reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan**
9 **kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam**
10 **satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan**
11 **belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan**
12 **seperti yang dinyatakan pada Paragraf 31 huruf b.**

13 **PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM** 14 **MENJADI SATUAN KERJA BIASA**

15 124. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut
16 status pola pengelolaan keuangan BLU pada satuan kerja
17 kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

18 125. **Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola**
19 **pengelolaan keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut**
20 **menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi**
21 **pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun**
22 **laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya**
23 **sebagai BLU.**

24 **TANGGAL EFEKTIF**

25 126. **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini**
26 **berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan**
27 **keuangan mulai Tahun Anggaran 2016.**

ILUSTRASI PSAP 13.A
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	xxxx	xxxx	xx	xxxx
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xx	xxxx
37					
38	PENGELUARAN				
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xx	xxxx
46	PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47					
48		xxxx	xxxx	xx	xxxx

ILUSTRASI PSAP 13.B
 Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

ILUSTRASI PSAP 13.C

Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas pada BLU	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)	xxx	xxx
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)	xxx	xxx
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)	xxx	xxx
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi amortisasi	(xxx)	(xxx)
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)	xxx	xxx
40			
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxxx	xxxx

ILUSTRASI PSAP 13.C

Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
42			
43	KEWAJIBAN		
44			
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)	xxx	xxx
55			
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
57	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	xxx
59	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)	xxx	xxx
60			
61	EKUITAS		
62	Ekuitas	xxx	xxx
63	JUMLAH EKUITAS (62)	xxx	xxx
64			
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)	xxxx	xxxx

ILUSTRASI PSAP 13.D
Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2					
5	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
10		xxx	xxx	xxx	xxx
11					
12	JUMLAH PENDAPATAN (10)	xxx	xxx	xxx	xxx
13					
14	<u>BEBAN</u>				
15					
17	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Beban (17 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26					
46					
47	Surplus/Defisit Operasional (12-25)	xxx	xxx	xxx	xxx
48					
49	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
50	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
52	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s.d. 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 + 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57					
58	<u>POS LUAR BIASA</u>				
59	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
61	JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60)	xxx	xxx	xxx	xxx
62	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 61)	xxx	xxx	xxx	xxx

ILUSTRASI PSAP 13.E

Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBN	XXX	XXX
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX
7	Pendapatan hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)	XXX	XXX
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
12	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
13	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
16	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17)	XXX	XXX
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18)	XXX	XXX
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
26	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
27	- Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
28	- Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
29	Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29)	XXX	XXX
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	XXX	XXX
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
36	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
38	- Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
39	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)	XXX	XXX
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	XXX	XXX
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	- Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
44	- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45)	XXX	XXX

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 51)	XXX	XXX
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 58)	XXX	XXX
60	Kenaikan/Penurunan Kas BLU (19+41+52+60)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62)	XXX	XXX

ILUSTRASI PSAP 13.F
 Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Anggota

Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Ahmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A., Anggota,
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap AnggotaKelompok Kerja
2. Mega Meilista, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., AnggotaKelompok Kerja
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., AnggotaKelompok Kerja
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., AnggotaKelompok Kerja
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos,SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., AnggotaKelompok Kerja
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., AnggotaKelompok Kerja
10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
12. Muliani S. Fajarianti, SE.,M.Ec.Dev., Anggota Kelompok Kerja
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc.,CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., AnggotaKelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja

